

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA

Iskandar¹, Hartoyo², Ujang Sumarwan², dan Ali Khomsan³

¹Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi GMK Sekolah Pascasarjana IPB

²Departemen IKK Fakultas Ekologi Manusia IPB

³Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB

ABSTRACT

The objective of the research is to determine factors affecting the family welfare and the efforts of family to enhance their livings. A cross-sectional survey involving 240 randomly selected samples of family in eight purposively selected villages has been conducted. Study used four methods to indicate family welfare: BPS (expenditure per capital compared to poverty line), BKKBN (six qualitative indicators), proportion of food expenditure, and family perception of their welfare. The results of the study indicated that the prevalence of poor family was vary from 8.8% (BPS methods) to 52.9% (proportion of food expenditure). By using BPS method as a benchmark, BKKBN and proportion of food expenditure methods are considered to be high sensitivity but lower specificity methods, while family perception method is considered to be high sensitivity and specificity method. Urban area tends to have higher prevalence of poor family compared to rural area. Family welfare of BKKBN method is significantly influenced the number of family member ($p < 0.05$), the age of husband), the age of wife, husband education, income, the existence of planning activity with $p < 0.01$ respectively, and rural area ($p < 0.05$). On other hand, using BPS method, family welfare is significantly influenced by wife education ($p < 0.05$), income ($p < 0.01$), husband occupation, asset ownership and the existence of planning activity in the family, with $p < 0.05$ respectively. Meanwhile, family welfare is affected by the age of husband ($p < 0.01$), the age of wife ($p < 0.01$), loan money from financial institution ($p < 0.05$), credit commodity access from individual and institution ($p < 0.01$), asset ownership ($p < 0.01$) and family perception ($p < 0.05$), rural area ($p < 0.05$), husband as a occupation merchant ($p < 0.05$), husband occupation as a labour ($p < 0.01$), asset ownership ($p < 0.05$), and distribution of duty in family ($p < 0.05$).

Keywords: Family welfare, Poverty indicator

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena sosial, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Fenomena ini telah menjadi perhatian global pada konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar deklarasi dan program aksi untuk pembangunan sosial di Copenhagen tahun 1995. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,

sosial dan standar kebutuhan yang lain (Herbert, 2001).

Misalnya, jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses kepelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Adapun penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu (1) faktor alamiah: kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam

dan lain-lain, (2) faktor nonalamiah: akibat kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Masalah-masalah yang timbul akibat kemiskinan tersebut antara lain: gizi buruk, busung lapar, penyakit menular, dan kasus kriminalitas (Lubis, 2006)

Secara konstitusional, tanggungjawab negara dalam mengatasi kemiskinan diatur dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, yang terlihat dari peran berbagai institusi mengadakan penanggulangan sesuai bidangnya seperti Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Departemen Sosial), Takesra, Kukesra (BKKBN), dan lain-lain. Namun demikian, penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan masih relatif tinggi. Bank Dunia (2006) mengatakan hampir 50% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, yaitu berpendapatan kurang 2 dollar AS per kapita per hari. Sementara itu, BPS (2006) melaporkan pada Maret 2006 ada 39,05 juta (17,8%) penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi dari pada tahun 2005 yaitu 35,10 juta (16%).

Fenomena masih tingginya kemiskinan menunjukkan bahwa program pemberantasan kemiskinan selama ini belum berhasil, karena model yang dibangun belum mampu membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh. Di lain pihak, beragam kriteria untuk mengukur tingkat kemiskinan, melahirkan kemiskinan bangsa yang “turun-naik” yang dapat menimbulkan interpretasi bahwa kemiskinan sengaja dibesarkan sebagai proyek berkelanjutan (duniaesai.com, 2006). Hal ini diakibatkan oleh program penanggulangan selama ini menggunakan data makro hasil Susenas oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga Pra-sejahtera dan KS-1 oleh BKKBN. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan garis kemiskinan yang diturunkan dari kebutuhan dasar kalori minimal 2100 kkal atau sekitar Rp. 152.847 per kapita per bulan. Garis kemiskinan untuk daerah perkotaan Rp. 175.324, dan untuk daerah perdesaan Rp. 131.256 (BPS, 2006). Di lain pihak garis kemiskinan yang diturunkan oleh BKKBN bersifat ekonomi dan nonekonomi. Penggunaan kriteria BPS dan BKKBN dapat membingungkan pemerintah lokal ketika ada

bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat berpedoman pada angka kemiskinan yang dihasilkan BPS, sedangkan pemerintah lokal menggunakan kriteria BKKBN sebagai target sasaran seperti yang terjadi di kabupaten Sumba Timur NTT ketika mendistribusi beras untuk keluarga miskin. Ketidakeragaman ini juga menimbulkan konflik di tingkat masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data mikro dari BKKBN untuk mengidentifikasi keluarga miskin. Menurut *Kota Bogor Dalam Angka* (2005), jumlah keluarga miskin di Kota Bogor adalah sebanyak 46.349 keluarga dari total keluarga 193.463 keluarga (24%), sedangkan menurut *Kabupaten Bogor Dalam Angka* (2005) jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bogor sebanyak 450.342 dari total keluarga 904.982 keluarga (49,8%). Dengan demikian total keluarga miskin di Bogor sebanyak 496.691 keluarga (45,2%)

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian antara lain: Pertama, bagaimanakah menganalisis tingkat kesejahteraan dengan berbagai metode pengukuran? Kedua, sejauh manakah karakteristik demografi dan karakteristik sosial ekonomi mempengaruhi kesejahteraan? Ketiga, sejauh manakah faktor eksternal yang menyangkut ketersediaan dan akses keluarga terhadap kelembagaan sosial dan program pemerintah mempengaruhi kesejahteraan? Keempat, bagaimanakah pencapaian kesejahteraan melalui manajemen? Secara umum penelitian ini bertujuan menggali secara komprehensif faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kesejahteraan dengan berbagai metode pengukuran.
2. Menganalisis pengaruh karakteristik demografi/sosial ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan.
3. Menganalisis faktor eksternal yang meliputi lingkungan tempat tinggal, kelembagaan sosial, dan program pemerintah yang berpengaruh terhadap kesejahteraan.
4. Menganalisis proses manajemen keluarga dalam mencapai kesejahteraan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep kesejahteraan mengacu pada UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan

bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spirituil dan materiel yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antaranggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1996). Untuk memenuhi kebutuhan spirituil dan materiel diperlukan manajemen yang baik. Di dalam pendekatan manajemen keluarga, diperlukan kerjasama antara suami, istri, anak, dan anggota lainnya. Tujuan hidup akan tercapai apabila semua subsistem secara fungsional melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya (Campbell, 1979). Keberfungsian subsistem sangat di dorong oleh apa yang menjadi tujuan hidup di satu sisi, sedang di sisi lain, pencapaian tujuan hidup dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki. Tujuan hidup yang ingin dicapai adalah pendidikan anak yang baik, memiliki status sosial, mempunyai keluarga sakinah, memiliki tabungan, memiliki rumah, dan lain-lain. Tujuan hidup dapat tercapai, apabila sumber daya yang tersedia memungkinkan. Untuk memudahkan dalam menetapkan pengalokasian sumber daya, digunakan dua cara pengukuran yaitu: (a) sumber daya uang, dan (b) sumber daya waktu.

Tujuan hidup keluarga sebagaimana dipaparkan di atas, sangat dipengaruhi oleh karakteristik keluarga dan faktor eksternal. Karakteristik keluarga mencakup: jumlah anggota, usia, fisiologi, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kepemilikan aset. Faktor eksternal meliputi: (a) kelembagaan sosial yang terdiri dari: BRI, BPR, dan lain-lain yang dapat diakses oleh keluarga untuk mendapatkan pinjaman, (b) kebijakan/program pemerintah menyangkut pemberian raskin, JPS, dana kompensasi BBM, kredit finansial, dan lain-lain, dan (c) lingkungan tempat tinggal. Ketiga unsur tersebut akan mempengaruhi perubahan sumber daya waktu/uang.

Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang diakibatkan oleh pendidikan, jumlah anggota, usia, dan kondisi fisiologi. Keempat komponen ini mempengaruhi perubahan pada sumber daya uang. Sebelum menetapkan tujuan, pengalokasian sumber daya waktu/uang

terlebih dahulu dilakukan komunikasi yang melibatkan anggota/pihak lain ketika membicarakan pendidikan anak, jumlah anak, ibu bekerja di luar rumah atau di dalam rumah, dan lain-lain. Komunikasi dimaksudkan untuk menampung berbagai masukan berupa pendapat/saran, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan suami/istri lebih tepat karena suami dan istri merupakan figur yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga.

Keputusan merupakan pilihan-pilihan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Keputusan-keputusan tersebut perlu direalisasikan, sehingga diperlukan manajemen keluarga. Manajemen merupakan kemampuan/keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Unsur-unsur manajemen yang perlu diperhatikan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) yang diharapkan dapat mempengaruhi apa yang menjadi tujuan hidup (Deacon dan Firebaugh, 1981). Untuk mengetahui apakah tujuan hidup keluarga tercapai atau tidak, digunakan berbagai pendekatan pengukuran antara lain: BPS, pengeluaran pangan, BKKBN dan Persepsi Keluarga.

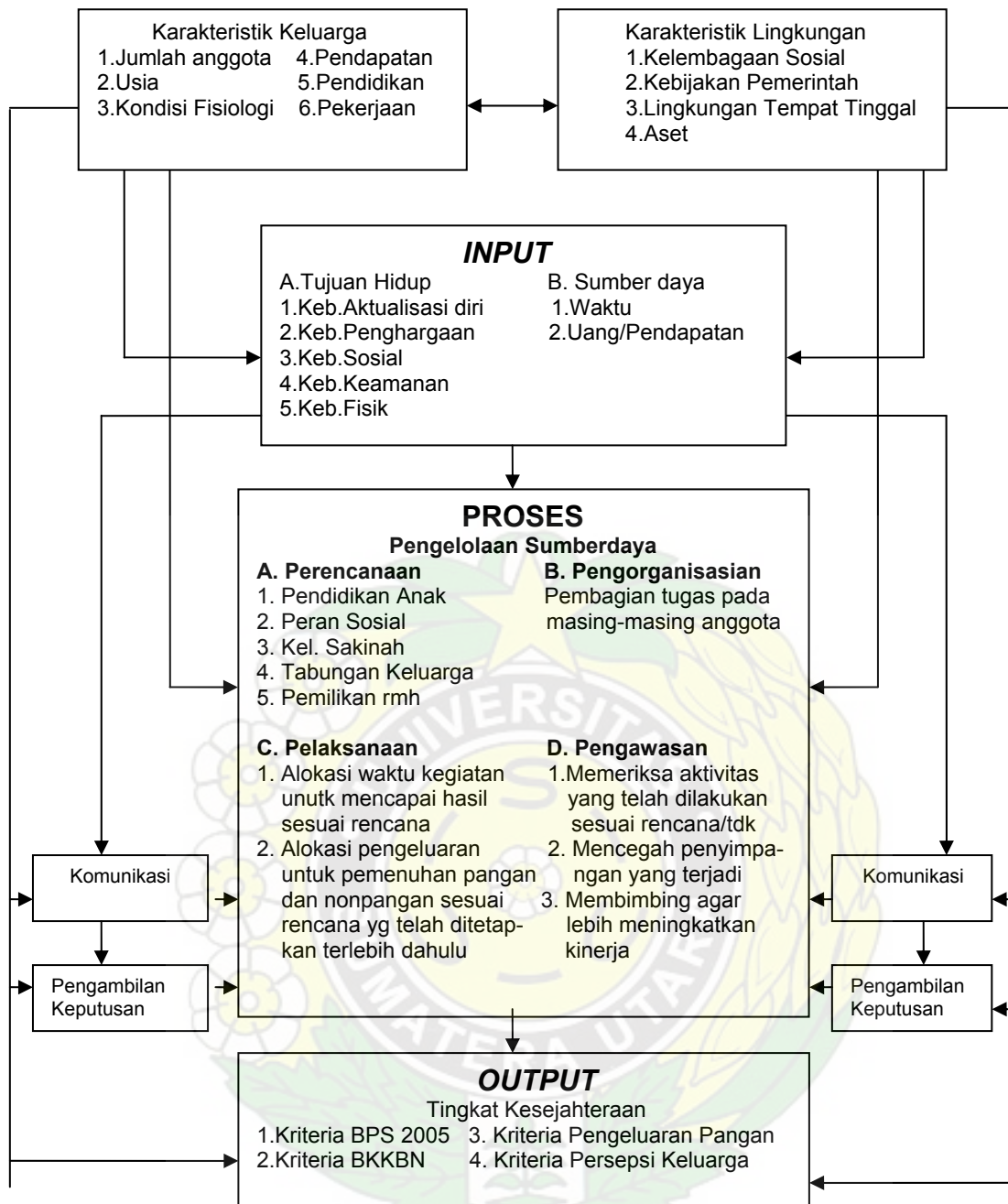
METODE

Desain, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Desain penelitian ini adalah *cross sectional survey*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, sedangkan waktu penelitian selama 9 bulan yaitu bulan April-Desember 2006.

Teknik Penarikan Contoh

Contoh dalam penelitian adalah 8 desa/kelurahan yang diambil secara *purposive* yaitu Desa Tegalwaru, Desa Cicadas, Desa Ciangsana, Desa Wanaherang, Desa Cibeureum, Desa Kopo, Kelurahan Gudang, dan Kelurahan Babakan Pasar. Dari tiap desa/kelurahan di ambil 30 keluarga contoh, yang diverifikasi dari data keluarga tahun 2005 yang dicatat oleh PLKB. sehingga jumlah sampel adalah 240 keluarga contoh. Penarikan contoh dilakukan secara proporsional.



Gambar 1. Bagan kerangka pikir pemberdayaan keluarga

Analisis Data

Tingkat kesejahteraan diukur dengan kriteria BPS, kriteria pengeluaran pangan, kriteria BKKBN, dan kriteria Persepsi Keluarga. BPS Kota Bogor/Kabupaten Bogor mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan. Keluarga miskin untuk Kota Bogor apabila pendapatan < Rp 175.000 per kapita per bulan dan keluarga miskin untuk Kabupaten Bogor apabila pendapatan < Rp 150.000/kapita/bulan. Kriteria Pengeluaran Pangan mengukur garis kemiskinan

berdasarkan pengeluaran pangan > 50%. BKKBN mengukur tingkat kesejahteraan dengan mengklasifikasikan keluarga Pra-KS dan KS I sebagai keluarga miskin, sedangkan kriteria persepsi keluarga menggunakan 33 pertanyaan dengan skala nilai jika jawaban ya diberikan skor 1, sedangkan tidak diberikan skor 0. Skor tersebut kemudian dikategorikan menjadi rumah tangga sejahtera jika skor jumlah jawaban “ya” lebih besar atau sama dengan 75% dan “tidak” jika skor kurang dari 75%. Keempat kriteria tersebut akan dianalisis untuk mengetahui

keakurasian mengidentifikasi sensitifitas/spesifisitas. Analisis hubungan antara kriteria digunakan uji khi kuadrat, sedangkan untuk menganalisis karakteristik demografi, karakteristik sosial ekonomi dan faktor eksternal terhadap kesejahteraan di ukur dengan regresi logistik. Untuk melengkapi analisis statistik, dilakukan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Keluarga Contoh

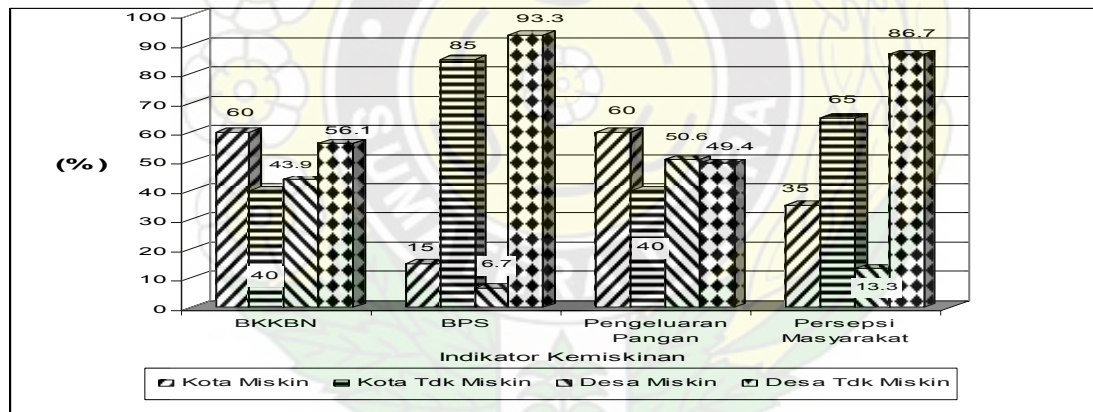
Jumlah anggota sampel kurang dari atau sama dengan empat orang yang dikategorikan keluarga kecil (50,4%). Usia keluarga contoh untuk KK 36-40 tahun (19,6%) dan istri 31-35 tahun (20,6%). Untuk keadaan fisiologi, sebagian besar KK (97,7%) dan istri (88,5%) berada dalam keadaan sehat. Untuk pendidikan, persentase terbesar baik pendidikan KK (35,7%) maupun istri (40,2%) berada dalam kategori tamat SD. Untuk pekerjaan, lebih dari separuh (54,4%) KK sebagai pedagang dan lebih dari separuh (67,1%) istri tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Untuk

pendapatan persentase tertinggi (20,8%) keluarga mempunyai kategori rata-rata pendapatan per kapita per bulan >Rp.500.000

Pengukuran Keakurasian Tingkat Kesejahteraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kota keluarga yang miskin berdasarkan kriteria BKKBN adalah 60%, jika menggunakan kriteria BPS maka keluarga yang miskin sebanyak 15%, sedangkan apabila menggunakan kriteria pengeluaran pangan maka keluarga yang miskin sebanyak 60%. Sementara itu, jika menggunakan kriteria persepsi keluarga maka keluarga yang miskin sebesar 35%.

Di lain pihak keluarga miskin di desa menurut kriteria BKKBN adalah 43,9%, jika menggunakan kriteria BPS keluarga miskin sebanyak 6,7%, sedangkan apabila menggunakan kriteria pengeluaran pangan maka keluarga miskin 50,6%. Sementara itu, jika menggunakan kriteria persepsi keluarga maka yang miskin adalah 13,3%.



Gambar 2. Sebaran keluarga berdasarkan berbagai kriteria kemiskinan

Tabel 1. Sebaran contoh berdasarkan indikator kesejahteraan BKKBN, pengeluaran pangan, persepsi subyektif dengan kriteria BPS sebagai *benchmark*

Indikator	Status Kemiskinan	Kriteria Kemiskinan BPS				Total	Khi-Kuadrat
		Miskin		Tidak Miskin			
		n	%	n	%	n	%
BKKBN	Miskin	19	90.5	96	43.8	115	47.9
	Tidak Miskin	2	9.5	123	56.2	125	52.1
	Total	21	100.0	219	100.0	240	100.0
Pengeluaran Pangan	Miskin	18	85.7	109	49.8	127	52.9
	Tidak Miskin	3	14.3	110	50.2	113	47.1
	Total	21	100	219	100	240	100.0
Persepsi Subyektif	Miskin	18	85.7	27	12.3	45	18.8
	Tidak Miskin	3	14.3	192	87.7	195	81.2
	Total	21	100	219	100	240	100.0

Keterangan: ** nyata pada $p < 0.05$

Untuk menentukan keakuratan sensitifitas/spesifisitas antara kabupaten/kota dengan keempat kriteria di atas, perlu ditetapkan satu pengujian standar untuk mengungkapkan secara pasti tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan nyata ($p < 0.05$) antara kriteria BKKBN, pengeluaran pangan, dan persepsi keluarga dengan BPS. Persentase positif palsu yang cukup tinggi terjadi pada kriteria pengeluaran pangan yaitu 49.8%, sedangkan positif palsu pada kriteria BKKBN sebesar 43.8%. Persentase positif palsu yang paling rendah adalah kriteria persepsi keluarga (12.3%).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Keluarga

Analisis sosiometri dalam berbagai masalah menunjukkan bahwa sebagian besar (79,1%) dikomunikasikan oleh suami/istri, 10,7% dikomunikasikan oleh suami/istri/anak, 5,9% dikomunikasikan oleh istri/saudara, 3,2% dikomunikasikan oleh istri/pihak lain, 0,7% dikomunikasikan oleh suami/saudara, serta 0,4% dikomunikasikan oleh suami/pihak lain, dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan 53,2% keputusan dibuat oleh suami/istri, 18,6% keputusan diambil oleh istri, 15,3% keputusan dominan diambil oleh istri, 10,5% keputusan dominan diambil oleh suami, dan 2,4% diambil oleh suami. Realisasi dari sejumlah keputusan terlihat pada hasil yang dicapai antara lain 65,0% dapat menyekolahkan anaknya, 12,9% mempunyai status sosial, 44,6% mempunyai keluarga yang sakinah, 21,2% memiliki tabungan, dan 31,2% mempunyai rumah sendiri. Hasil penelitian menunjukkan 40,0% meraih satu tujuan hidup, dan 4,2% meraih lima tujuan hidup. Untuk merealisasi keputusan tersebut, beberapa unsur manajemen yang perlu dilakukan adalah perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan 62,9% memiliki rencana, sedangkan 19,6% melakukan pembagian tugas. Hal ini di dukung oleh penelitian rezeki (2006) bahwa dalam hal keuangan di atur oleh istri baik ibu bekerja (65,1%) maupun ibu tidak bekerja (56,7%). Penyediaan menu sehari-hari pada ibu bekerja (90,9%) maupun ibu tidak bekerja (86,5%). Persentase tertinggi pekerjaan domestik dilakukan oleh istri baik yang bekerja (63,6%) dan tidak bekerja (65,5%),

partisipasi suami cukup tinggi yaitu lebih dari separuhnya. Untuk pelaksanaan dimaksud adalah alokasi pendapatan dan alokasi waktu kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengeluaran/kap/bln untuk pangan Rp. 236.583.3 dan nonpangan Rp. 204.826.6, sedangkan 30,8% tidak melakukan pengawasan. Sementara itu, alokasi waktu kegiatan produksi suami berkisar antara 4-10 jam per hari, sedangkan istri berkisar antara 2-6 jam per hari.

Deacon dan Firebaugh (1981). mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan untuk memperoleh sesuatu hasil melalui beberapa unsur manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pada penelitian ini akan dianalisis beberapa faktor internal/eksternal yang mempengaruhi manajemen. Faktor internal yang mempengaruhi proses manajemen adalah jumlah anggota, umur KK/istri, pendidikan KK/istri, pendapatan, kepemilikan aset, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses manajemen adalah tempat tinggal. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pendidikan KK yang tinggi berpeluang lebih tinggi 1.373 kali untuk melakukan pembagian tugas dibanding KK yang tingkat pendidikannya rendah, sedangkan contoh yang pendapatannya tinggi berpeluang lebih tinggi 1.000 kali untuk melakukan pengawasan dibanding yang pendapatannya rendah. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses manajemen adalah tempat tinggal. Responden yang tinggal di kota memiliki peluang lebih tinggi 2.705 kali untuk melakukan perencanaan dibanding yang tinggal di desa, sedangkan contoh yang tinggal di kota berpeluang lebih tinggi 3.477 kali untuk melakukan pembagian tugas dibanding yang tinggal di desa.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan; sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan

akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, maka pada penelitian ini dilakukan analisis faktor internal, eksternal dan manajemen keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan menurut indikator BKKBN adalah umur KK/istri, pendidikan KK, pendapatan; sedangkan faktor eksternal adalah tempat tinggal. Sementara itu, faktor manajemen yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dengan indikator BPS adalah pendidikan istri, pendapatan, pekerjaan suami bukan buruh, kepemilikan aset dan perencanaan. Kesejahteraan dengan menggunakan indikator pengeluaran pangan meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah umur KK/istri, sedangkan faktor eksternal adalah pinjaman uang/kredit barang. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan menurut indikator persepsi keluarga adalah pendapatan, pekerjaan suami dan kepemilikan aset; faktor eksternal meliputi tempat tinggal dan faktor manajemen yang berpengaruh adalah pembagian tugas.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pendapatan dan kepemilikan aset merupakan faktor internal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pada tiga indikator dari empat indikator yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil analisis ini juga memberikan gambaran bahwa keluarga dengan pendapatan yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk sejahtera dibandingkan keluarga dengan pendapatan yang rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Fan (1997) bahwa pendapatan akan menentukan daya beli terhadap pangan dan fasilitas lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Selain itu, keluarga yang memiliki aset, lebih sejahtera dibandingkan keluarga yang tidak memiliki aset. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Bryant (1990) bahwa aset adalah sumber daya atau kekayaan yang

dimiliki oleh keluarga. Aset akan berperan sebagai alat pemuas kebutuhan. Oleh karena itu keluarga yang memiliki aset lebih banyak cenderung lebih sejahtera jika dibandingkan dengan keluarga yang memiliki aset terbatas. Kepemilikan aset meliputi kepemilikan rumah, kepemilikan ternak, kepemilikan kendaraan, kepemilikan mebel, dan lain-lain.

Umur KK/istri merupakan faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan menurut indikator BPS dan pengeluaran pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa umur KK yang lebih muda mempunyai peluang untuk sejahtera lebih tinggi dibanding umur KK yang lebih tua, sebaliknya umur ibu yang lebih tua mempunyai peluang lebih tinggi untuk sejahtera dibandingkan umur ibu yang lebih muda. Hasil penelitian ini di dukung oleh pendapat Guhardja, *et al.* (1993) bahwa rendahnya pendapatan disebabkan oleh belum banyaknya pengalaman kerja, keterbatasan keterampilan, atau yang tidak bekerja karena merawat anak-anaknya. Sebaliknya, istri yang tua atau dalam kategori keluarga menengah yang berusia 45-54 tahun, biasanya pendapatan keluarga mencapai tertinggi, suami berada dalam puncak kariernya dan istrinya juga bekerja secara penuh atau paruh-waktu, sehingga lebih sejahtera dari pada keluarga muda atau istri yang muda.

Untuk tingkat pendidikan, hanya pendidikan KK yang mempengaruhi kesejahteraan menurut indikator BKKBN dan pendidikan istri mempengaruhi kesejahteraan menurut indikator BPS. Tingkat pendidikan KK dan istri yang tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk sejahtera dibandingkan tingkat pendidikan KK dan istri yang rendah. Hal ini di dukung oleh penelitian Lee dan Hanna (1990) bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan. Semakin tinggi pendidikan yang diterima seseorang baik suami maupun istri, semakin tinggi pula status ekonominya.

Faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan menurut indikator BKKBN dan persepsi keluarga adalah tempat tinggal. Faktor eksternal lainnya adalah pinjaman uang/kredit barang menurut indikator pengeluaran pangan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keluarga yang tinggal di desa memiliki peluang sejahtera

lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tinggal di kota. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Maryono (1999) bahwa tingkat kesejahteraan kota dan desa sebagai akibat dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Masyarakat di perkotaan lebih merasakan kesulitan dalam mempertahankan penghasilan, sedangkan kenaikan penghasilan kebanyakan terjadi di perdesaan. Faktor eksternal lainnya adalah pinjaman uang/barang menurut indikator pengeluaran pangan adalah sejahtera. Hal ini diperkuat oleh penelitian Zain (1996) bahwa dari 897 rumah tangga miskin yang memperoleh pinjaman, terdapat 80% mampu meningkatkan kesejahteraan.

Hal yang menarik pada penelitian ini adalah bahwa BLT tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Penelitian Reziki (2006) menunjukkan bahwa dana BLT dipakai untuk kebutuhan pangan sehari-hari, bahkan pada ibu bekerja (33,3%) maupun ibu tidak bekerja (27,0%) menghabiskan uang BLT dalam sehari, sedangkan 40,4% ibu bekerja dan 35,1% ibu tidak bekerja membelanjakan uangnya dalam jangka waktu 2-7 hari. Ibu yang menghabiskan uang dalam kurun waktu 8-14 hari cukup banyak hal ini dapat dilihat pada ibu bekerja (18,2%) yang menghabiskan uangnya lebih dari sebulan. Dengan demikian, BLT tidak mendidik keluarga untuk berusaha, tetapi membuat ketergantungan yang besar. Sebaiknya BLT tersebut diberikan bukan dalam modus bantuan mengatasi kemiskinan agar tidak lebih parah, tetapi sebaiknya BLT diberikan dalam mendorong kegiatan produktif dan komersial dengan modus simpan pinjam sebagai *entry-point*-nya dalam mengatasi kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kriteria BPS mengungkap 91,2% keluarga sejahtera, menurut kriteria BKKBN 52,1% keluarga sejahtera, menurut kriteria pengeluaran pangan 47,1% keluarga sejahtera, dan menurut kriteria persepsi keluarga, 81,2% keluarga sejahtera.
2. Faktor demografi dan sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan adalah jumlah anggota, umur suami dan istri, pendidikan suami dan istri, pendapatan, kepemilikan aset, status

pekerjaan suami sebagai pedagang, dan bukan buruh.

3. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah tempat tinggal di desa, kredit uang/barang pada institusi/individu.
4. Unsur manajemen yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, dan pembagian tugas.

Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan, perlu adanya konsensus yang sama dalam penggunaan indikator.
2. Jumlah anggota yang banyak merupakan beban, sehingga keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan materiel/nonmateriel, bahkan cenderung menimbulkan masalah sosial, sehingga perlu ada upaya pengendalian penduduk, sehingga keluarga bisa melakukan investasi pendidikan, agar menghasilkan SDM yang berkualitas.
3. BLT dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan sehingga, perlu ditinjau kembali untuk merubah kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara pinjaman tanpa bunga pinjaman untuk usaha yang bersifat produktif dan komersial.
4. Penelitian ini mengungkap tingkat kesejahteraan yang cukup baik sesuai persepsi keluarga, namun 33 pertanyaan yang digunakan tidak disederhanakan menjadi lebih simpel, sehingga diharapkan ada penelitian lanjutan bagi mereka yang akan melakukan penelitian tentang kesejahteraan berdasarkan persepsi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia, 2006. Kemiskinan, Bank Dunia, dan Revitalisasi Pertanian. <http://www.kompas.com>
- Berita Resmi Statistik. 2006. Tingkat Kemiskinan di Indonesia. <http://www.bps.go.id>
- BKKBN, 1996. Panduan Pemb. Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Jakarta
- BPS, 2005. Kabupaten Bogor dalam Angka. BPS. Bogor
- _____. 2005. Kota Bogor Dalam Angka. BPS. Bogor

- Bryant, W.K. 1990. *The Economic Organization of the Household*. Cambridge University Press.
- Campbell, B.J. 1979. *Understanding Information Systems, Foundations for Control*, Prentice-Hall of India, New Delhi.
- Deacon, R.E., & Firebaugh, F.M. 1981. *Family Resource Management Principles and Applications*. 470. Atlantic Avenue. Boston.
- duniaesai.com. 2006. Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan. <http://www.duniaesai.com>.
- Fan, J.X. 1997. *Expenditure Patterns of Asian Americana: Evidence from the US Consumer Expenditure Survey 1980-1992*. University of Utah. *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 25,4,339-368.
- Guhardja, S. et al. ,1993. Petunjuk Laboratorium Manajemen Sumberdaya Keluarga. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor.
- Herbert, P. 2001. *The DAC Guidelines Poverty Reduction*
- Hye, K.L., & Hanna, S. 1990. *Pattern of Wealth Accross Household Type and Over An Artificial Life Cycle*, Family Resource Management Departement The Ohio State University.
- Lubis, Z. 2006. Penanggulangan Kemiskinan. <http://www.waspada.co.id>
- Maryono, E. 1999. Peta Dampak Krisis dan Kapasitas Masyarakat. Jakarta.
- Rezeki, A.S, 2006. Peran Gender Dalam Kehidupan Keluarga Miskin Penerima Subsidi Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Skripsi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.
- Zain, D. 1996. Kaji Tindak Bantuan Kredit Kepada Keluarga Miskin. <http://digilib.Brawijaya.ac.id>

